

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Gereja merupakan sebuah institusi atau komunitas yang terdiri dari orang-orang yang memiliki keyakinan yang sama, dan berkumpul untuk melakukan peribadatan, belajar, dan mendukung sesama dalam kehidupan Rohani. Gereja merupakan persekutuan orang-orang yang menerima anugerah keselamatan dari Allah, melalui penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus.<sup>1</sup> Menurut Jhon Calvin, Gereja adalah persekutuan orang-orang percaya yang dipilih oleh Allah untuk menjadi bagian dari tubuh Kristus, yang dipimpin oleh Roh Kudus, dan juga merupakan tempat dimana orang-orang percaya mengalami pengajaran, Persekutuan, dan ibadah yang benar kepada Kristus. Sedangkan politik adalah sebuah proses yang melibatkan pembentukan kebijakan, pengambilan keputusan, dan distribusi kekuasaan dalam masyarakat. kedua hal ini memiliki keterikatan dalam kehidupan masyarakat. Sebagaimana hal tersebut, Jhon Calvin yang merupakan seorang Teolog Reformasi memberikan sebuah landasan dan konsep terhadap hubungan antara Gereja dan juga politik.

---

<sup>1</sup>Josef M.N. Hehanussa dan Jhon C.Simon, *Gerrit Singgih Dalam Pergulatan Gereja Dan Masyarakat* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015), 119.

Jhon Calvin merupakan seorang pemimpin gerakan gereja reformasi yang terlahir dengan nama Jean Cauvin, dia lahir pada tanggal 10 Juli 1509 di kota Noyon, Prancis Utara. Jhon Calvin merupakan seorang sarjana yang juga belajar tentang Teologi. Ia dijuluki sebagai seorang sarjana dari Jenewa. Dalam perjalanan kehidupan dan pemikirannya, Calvin juga kemudian memiliki peran penting dalam dunia politik khususnya dikalangan kekristenan. John Calvin menawarkan kerangka konseptual yang kuat mengenai hubungan agama dan politik. Pemikiran Calvin dan pengalaman Calvin tertuang dalam tulisan buku " Calvin *Institutes of the Christian Religion*". Konsep yang dibangun oleh Jhon Calvin dalam pandangannya terhadap politik, diantaranya: Kedaulatan Allah dan Teokrasi.

Jhon Calvin juga dengan pengajarannya diikuti oleh banyak gereja-gereja di dunia yang kemudian mereka disebut dengan *Calvinisme*. Penganut ajaran *Calvinisme* menggunakan sistem pemerintahan yang disebut dengan Presbiterial Sinodal. Salah satu Institusi Gereja yang menganut ajaran Calvinis adalah Gereja Toraja Mamasa (GTM) yang pusat sinodenya berada di Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, Indonesia.

Gereja Toraja Mamasa yang merupakan suatu lembaga Gereja, memiliki peran dan pengaruh penting dalam kehidupan Masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Mamasa. Gereja Toraja Mamasa adalah salah satu gereja Protestan yang menganut aliran Protestan *Calvinisme* di Indonesia. Pemerintahan dari organisasi Gereja Toraja Mamasa ini berpusat di

Kabupaten Mamasa yang sering disebut dengan *Pitu Ulunna Salu* atau *Kondosapata*'.

Persoalan mengenai Pendeta dan politik merupakan suatu hal yang banyak diperbincangkan. Banyak kalangan terutama dalam dunia Kekristenan itu sendiri yang memiliki pandangannya masing-masing mengenai persoalan demikian. Ada yang menganggap dan setuju pendeta boleh saja ikut langsung dalam politik, ketika alasannya tepat bahwa mereka dengan keyakinannya benar-benar ingin membawa sebuah pembeda, bijak dalam menentukan keputusan dan berani menolak pada sesuatu yang tidak baik dan mengikuti apa yang baik. Banyak pula yang tidak setuju akan hal demikian. Dengan alasan dan pemahaman bahwa seorang pendeta harusnya fokus dalam masalah gereja saja, misalkan penggembalaan dan juga pelayanan dalam jemaat. Ketika mereka berpartisipasi langsung, dalam hal ini berpartisipasi dalam politik praktis maka pelayanan seorang pendeta kurang maksimal dalam jemaat atau Gereja itu sendiri.<sup>2</sup> Hal demikian pula kemudian di alami dalam lembaga Gereja Toraja Mamasa, dengan keikutsertaan pendeta bahkan pelayan-pelayan dalam gereja, ikut langsung (partisipan) dalam dunia politik praktis, memunculkan banyak polemik dalam tubuh Gereja Toraja Mamasa itu sendiri. Ada yang setuju akan keterlibatan langsung pendeta dalam dunia politik, dengan harapan bahwa

---

<sup>2</sup>Ibid, 13.

Ketika mereka ikut maka bisa saja akan mengambil keputusan yang baik dalam setiap kebijakan mereka. Lain sisi yang tidak setuju, mengatakan bahwa Pendeta, pelayan Tuhan dan bahkan gereja harusnya tidak boleh terlibat langsung dalam dunia politik praktis, dengan alasan bahwa tidak ada keterkaitan antara politik dengan pelayanan. Hal tersebut terus berkembang yang nampaknya memunculkan kecurang harmonisan dalam Gereja Toraja Mamasa.

Penelitian terdahulu berdasarkan tulisan Mery Kalimon dalam Jurnal Ledalero yang berjudul "Yohanes Calvin: Politik, Jabatan Gerejawi, dan Relevansinya Bagi Gereja Masa Kini. Mery Kalimon menyoroti bahwa menurut Calvin, jabatan gerejawi harus dipisahkan dari jabatan negara, dan pendeta berfokus pada kebutuhan spiritual jemaat, sementara pemerintah mengurus kesejahteraan sipil. Menurutnya, ajaran Calvin ini sangat relevan bagi gereja masa kini di Indonesia. Pemisahan tersebut diperlukan untuk mencegah campur aduk peran antara gereja dan negara yang dapat membingungkan fungsi masing-masing. Dengan mempertahankan komitmen iman dan tidak terlibat langsung dalam politik, gereja diharapkan dapat berkontribusi lebih efektif teradap masyarakat. Hal ini kemudian menyarankan refleksi kritis terhadap warisan Calvin untuk memperkuat peran gereja dalam konteks modern tanpa mengorbankan integritas spiritual dan fungsinya.

Penelitian lain yang dilakukan ditulis oleh Jemmy Torro Mangopang, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Tentang “Keterlibatan Pendeta dalam Pemilu Legislatif di Kabupaten Toraja Utara”. Dimana ia bertujuan untuk mengeksplorasi motivasi dan peran pendeta dalam politik praktis, khususnya dalam pemilihan legislatif di Kabupaten Toraja Utara. Ia berpendapat bahwa pendeta sering kali dianggap sebagai pemimpin informal dengan pengaruh besar dalam masyarakat, sehingga keterlibatan mereka dalam politik dapat membawa dampak signifikan.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa motivasi pendeta untuk terjun ke dalam politik praktis berkaitan dengan tuntutan dari kelompok organisasi kegerejaan dan organisasi politik. Pendeta sering mendukung kandidat politik dengan harapan mendapatkan imbalan untuk pembangunan gereja. Dukungan ini sering kali terkait dengan janji-janji dari calon legislatif yang berpotensi memberikan keuntungan finansial atau material bagi gereja dan komunitas jemaat.<sup>3</sup>

Penelitian ini mengidentifikasi tiga pola keterlibatan pendeta dalam politik praktis yakni: Pertama, Sebagai Calon Anggota Legislatif dimana pendeta berusaha membawa nilai-nilai moral dan etika gereja ke dalam proses legislasi dan kebijakan publik. Kedua, sebagai Pendukung Suara dan

---

<sup>3</sup> Arrang Adiyaksa, “KETERLIBATAN PENDETA DALAM PEMILU LEGISLATIF DI KABUPATEN TORAJA UTARA” (UNIVERSITAS HASANUDDIN, 2015). 7-57

Kampanye dimana pendeta aktif dalam menggalang dukungan untuk kandidat tertentu, sering kali dengan harapan mendapatkan bantuan bagi komunitas gereja mereka. Dan yang Ketiga, sebagai Anggota Struktur Partai Politik, pendeta berusaha memperkuat posisi partai dan memperluas pengaruhnya di masyarakat.

Keterlibatan pendeta dalam politik praktis menghadapi tantangan utama berupa risiko pelanggaran etika gereja dan potensi konflik kepentingan. Pendeta dapat terpaksa mengabaikan panduan dan nilai-nilai moral gereja demi mencapai tujuan politik mereka, yang dapat menimbulkan ketegangan dalam komunitas gereja jika ada perbedaan pandangan politik di antara jemaat.<sup>4</sup>

Penelitian ini kemudian menyarankan agar para tokoh agama, termasuk pendeta, menetapkan arah politik yang sesuai dengan etika politik Kristen. Organisasi gereja harus dibina agar terbebas dari usaha mobilisasi kelompok atau individu tertentu untuk memenuhi kepentingan politik mereka. Pendeta yang terlibat dalam politik praktis harus memiliki integritas iman yang kuat sehingga dapat memberikan pengaruh positif di masyarakat dan mampu membedakan antara kepentingan pribadi dan kebutuhan publik secara umum. Lain halnya dengan Markus Amid dalam penelitiannya yang ditulis pada Jurnal yang berjudul "Urgensi Keterlibatan Pendeta dalam Politik

---

<sup>4</sup> Ibid. 7-57

Praktis". Ia membahas secara mendalam tentang peran penting pendeta dalam politik praktis, dilihat dari perspektif etis dan teologis Kristen. Penelitiannya ini didasarkan pada pemahaman bahwa pendeta memiliki peran signifikan tidak hanya dalam melayani jemaat tetapi juga dalam kehidupan sosial yang lebih luas, termasuk politik. Peran sosial yang diemban oleh pendeta mencakup pendidikan, budaya, ekonomi, dan politik. Keterlibatan pendeta dalam politik seringkali dipersepsikan sebagai bagian dari gaya hidup seorang pemimpin rohani yang bertujuan untuk melayani dan membawa pengaruh konstruktif di masyarakat.<sup>5</sup>

Penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa politik didefinisikan sebagai usaha untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan mengatur sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, keterlibatan pendeta dalam politik dilihat sebagai usaha untuk menciptakan kebahagiaan dan keadilan bagi masyarakat. Istilah "pendeta" meskipun tidak ditemukan dalam Alkitab, telah dikontekstualisasikan dalam gereja-gereja Protestan di Indonesia untuk menyebut pejabat gereja yang memiliki peran serupa dengan rasul, nabi, atau gembala dalam Alkitab. Pendeta memiliki landasan teologis yang kuat untuk terlibat dalam politik praktis, dengan banyak contoh dalam Alkitab seperti Musa dan Salomo yang terlibat dalam urusan politik demi kebaikan umat mereka.

---

<sup>5</sup> Markus Amid, "Urgensi Keterlibatan Pendeta Dalam Politik Praktis," *Voice Of HAMI, Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 3 No. 2 (2021): 114–130.

Pendeta yang terlibat dalam politik diharapkan untuk menjadi "garam dan terang" di masyarakat. Ini berarti bahwa pendeta tidak hanya harus melayani jemaat tetapi juga harus aktif dalam upaya menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan. Pendeta yang terlibat dalam politik dianggap mampu memberikan pengaruh positif dan konstruktif, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap para pemimpin politik.

Perubahan sosial dapat dicapai melalui tindakan politik yang berfokus pada reformasi struktur sosial, peningkatan partisipasi masyarakat, dan penerapan nilai-nilai keadilan. Gereja memiliki tugas penting dalam pemberitaan Injil dan tindakan kasih yang seimbang untuk menciptakan transformasi sosial. Keterlibatan pendeta dalam politik harus didasarkan pada nilai-nilai teologis yang bertujuan untuk kebaikan umum, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Pendeta yang terlibat dalam politik diharapkan untuk memiliki visi yang jelas tentang perubahan sosial dan berkomitmen untuk memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bagi semua. Ini mencakup upaya untuk mengatasi kemiskinan, penindasan, dan ketidakadilan melalui kebijakan yang adil dan berorientasi pada kesejahteraan publik.<sup>6</sup>

Hasahatan Hutahean juga dalam tulisannya yang berjudul "Teologi Politik Gereja: Menemukan dan Memancarkan Tritugas Gereja dalam Pilkada

---

<sup>6</sup> Ibid. 114-130

dan Pilpres" dalam jurnal *MELO*, mengkaji peran gereja dalam konteks politik Indonesia, dengan fokus utama pada keterlibatan gereja dalam proses politik dan bagaimana gereja dapat memenuhi tiga tugas utamanya. Tulisannya ini dimulai dengan latar belakang diskusi-diskusi yang terjadi pada awal tahun politik 2014, yang menyoroti pentingnya peran gereja dalam menghadapi tantangan politik saat itu.

Ia menegaskan bahwa gereja memiliki peran penting dalam memberikan edukasi kepada jemaatnya untuk menghindari fanatisme politis yang sering kali dibalut dalam narasi agama. Hal ini penting terutama menjelang dan pasca pemilihan umum, di mana potensi konflik horizontal akibat perbedaan pilihan politik meningkat. Dengan demikian, gereja harus berperan aktif dalam mengarahkan jemaatnya untuk memilih dengan bijaksana, berdasarkan nilai-nilai kristiani yang menjunjung tinggi keadilan dan kesejahteraan Bersama.<sup>7</sup>

Menurutnya, Alkitab sendiri tidak memberikan pilihan untuk mengabaikan ranah politik, melainkan mengajarkan bahwa pemerintahan adalah bagian dari rencana Allah (Roma 13). Oleh karena itu, gereja harus memberikan arahan teologis yang jelas kepada jemaatnya, sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam politik secara benar dan bermartabat, dengan tujuan menciptakan masyarakat yang adil dan Sejahtera.

---

<sup>7</sup> Hasahatan Hutaheaen, "Teologi Politik Gereja: Menemukan Dan Memancarkan Tritugas Gereja Dalam Pilkada Dan Pilpres," *MELO: Jurnal Studi Agama-Agama* 1 No.1 (2021): 1-17. 1-17

Secara keseluruhan, ia berargumen bahwa gereja memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa keterlibatan politik para jemaatnya tidak menyimpang dari nilai-nilai kristiani. Dengan begitu, gereja dapat berkontribusi secara positif terhadap pembangunan bangsa dan negara, menghindari keterlibatan dalam politik praktis yang hanya mementingkan kepentingan sesaat atau kelompok tertentu. Penulis mengajak gereja untuk melihat politik sebagai sarana untuk melayani dan menyejahterakan masyarakat luas, dengan tetap menjaga integritas dan panggilan ilahi yang dimilikinya.<sup>8</sup>

Berdasarkan hal tersebut, melalui analisis perbandingan keikutsertaan pendeta dalam aktifitas politik di Gereja Toraja Mamasa, penelitian ini memiliki tujuan yakni membandingkan pandangan politik Gereja Toraja Mamasa melalui keikutsertaan pendeta-pendeta yang ikut dalam dunia politik di Gereja Toraja Mamasa dengan prinsip-prinsip moral dan etika Kristen dalam tatanan politik yang digagas oleh Jhon Calvin. Analisis pemikiran Calvin ini diharapkan dapat memberi pandangan yang baru tentang nilai-nilai yang bisa saja menjadi panduan Pendeta Gereja Toraja Mamasa dalam ranah politik.

Dengan menyelidiki perbandingan keikutsertaan langsung pendeta dan pandangan teologis Calvin, tulisan ini diharapkan dapat memberi

---

<sup>8</sup> Ibid. 1-17

pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana Gereja, Khususnya Gereja Toraja Mamasa berinteraksi dengan dunia politik, serta apa persamaan dan perbedaan pemikiran Calvin dan kebijakan politik Gereja Toraja Mamasa serta para pendeta tersebut.

#### **B. Fokus Masalah**

Fokus masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana pandangan Gereja Toraja Mamasa melalui Keikutsertaan pendeta yang ikut dalam praktik politik sama atau bertentangan dengan pandangan dan prinsip politik yang Jhon Calvin pikirkan.

#### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, apa kesamaan dan perbedaan antara pandangan dan keikutsertaan pendeta Gereja Toraja Mamasa dalam politik dengan pandangan politik Jhon Calvin?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menguraikan pandangan politik John Calvin dan prinsip-prinsip yang mendasarinya serta dan membandingkan dengan pandangan politik Gereja Toraja Mamasa melalui keikutsertaan pendeta dalam praktik politik. Serta Menganalisis persamaan dan perbedaan antara pandangan politik John Calvin dan pandangan politik

melalui keterlibatan politik pendeta Gereja Toraja Mamasa.

## **E. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Akademik**

Tulisan ini diharapkan dapat memberi sumbangsi pengetahuan kepada civitas Akademik Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Toraja, Khususnya Program Studi Teologi Kritsen. Bahwa perlunya memahami tugas dan tanggung jawab sebagai pelayan Tuhan ditengah-tengan Masyarakat, bangsa dan Negara.

Skripsi ini menambah wawasan dan pengetahuan mengenai interaksi antara gereja dan politik, khususnya dalam konteks Gereja Toraja Mamasa. Ini membantu mahasiswa dan akademisi untuk memahami lebih dalam tentang bagaimana prinsip-prinsip teologi Kristen dapat diaplikasikan dalam kehidupan politik.

Penelitian ini juga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai tugas dan tanggung jawab sebagai pelayan Tuhan di tengah-tengah masyarakat, bangsa, dan negara. Ini penting untuk membentuk pandangan yang lebih baik tentang peran gereja dan pemimpinnya dalam kehidupan sosial dan politik.

Dengan menyelidiki perbandingan antara pandangan teologis John Calvin dan praktik politik pendeta Gereja Toraja Mamasa, penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam tentang persamaan dan

perbedaan dalam pemikiran dan kebijakan politik. Ini membantu memperluas perspektif akademik tentang hubungan antara gereja dan negara. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan dalam bidang teologi politik. Ini membuka peluang untuk eksplorasi lebih lanjut tentang bagaimana prinsip-prinsip teologi dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh dinamika politik lokal dan nasional.

Skripsi ini berfungsi sebagai referensi penting bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti di bidang teologi Kristen. Penelitian ini menyediakan data dan analisis yang dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran dan diskusi di lingkungan akademik.

## **2. Manfaat Praktis**

Tulisan ini memberikan wawasan kepada pembaca, khususnya warga Gereja Toraja Mamasa, tentang batasan dan peran gereja dalam urusan negara. Ini penting agar jemaat dapat memahami sejauh mana keterlibatan mereka dalam politik tanpa melanggar prinsip-prinsip gereja. Penelitian ini dapat menjadi landasan bagi pendeta dalam memahami peran mereka di tengah masyarakat dan dalam dunia politik. Ini membantu pendeta untuk mengetahui batasan-batasan yang seharusnya mereka jaga agar tidak terjadi konflik kepentingan antara tugas gereja dan keterlibatan politik.

Tulisan ini juga bertujuan untuk meluruskan pemikiran-pemikiran yang sering kali menjadi polemik di tengah-tengah gereja

mengenai keterlibatan gereja dan pendeta dalam politik. Dengan demikian, ini membantu mencegah konflik internal dan memperkuat kesatuan di antara jemaat.

Pendeta yang memahami dan menjalankan peran mereka dengan tepat dalam politik dapat memberikan pengaruh positif di masyarakat. Ini membantu dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil dan sejahtera, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin gereja dan politik. Skripsi ini dapat berfungsi sebagai alat edukasi bagi jemaat untuk memahami lebih baik tentang hubungan antara agama dan politik. Ini membantu jemaat untuk menjadi lebih kritis dan bijaksana dalam melihat peran gereja dan pemimpinnya dalam politik.

Dengan demikian, skripsi ini memberikan kontribusi praktis yang signifikan bagi gereja dan masyarakat, terutama dalam memahami dan mengelola hubungan antara agama dan politik secara lebih bijaksana dan etis.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Adapun yang menjadi acuan dalam penulisan penelitian ini sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari: Latar belakang masalah, fokus , masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori yang berkaitan dengan topik penelitian yang terdiri

dari: Politik, politik dan kehidupan sosial Jhon Calvin, teologi politik Calvin, Politik Teokrasi, Hubungan Gereja dan Negara menurut Jhon Calvin, dan pandangan Gereja Toraja Mamasa tentang politik.

BAB III : Metode penelitian yang terdiri dari: Jenis metode penelitian, gambaran umum lokasi penelitian, waktu dan tempat penelitian, jenis data, Teknik pengumpulan data, narasumber/informan, Teknik analisis data, pengujian keabsahan data, dan jadwal penelitian.

BAB IV : Temuan dan Analisis yang terdiri dari: Gambaran umum Lokasi, Deskripsi hasil penelitian dan analisis penelitian.

BAB V : Penutup yang terdiri dari: Kesimpulan dan saran.